

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi orang beriman sesungguhnya tidak hanya terbatas pada relasi vertikal personal antara seorang pribadi atau komunitas dengan Allah, tetapi juga merambat dalam relasi horisontal sosial politis antara satu pribadi dengan pribadi yang lain antar satu komunitas iman dengan komunitas iman yang lain. Dimensi horisontal sosial politis ini tidak lain adalah medan perwujudan iman kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang mengarahkan diri dalam melaksanakan tugas hidup dan yang melibatkan diri dalam persoalan sosial politis, untuk memberikan jawaban kepada Allah yang memanggil dia. Oleh karena itu Gereja bukan terutama mereka yang berkumpul dalam gedung gereja untuk mengungkapkan imannya kepada Allah, melainkan mereka semua yang melibatkan iman mereka ke dalam usaha setiap hari, yaitu pada saat sejarah sekarang ini ke dalam pergulatan sosial - politis.¹

Gereja adalah umat Allah dalam perjalanan. Gereja bukan gudang kesucian yang menyelamatkan dunia dengan memberi pengarahan serta ajaran dan dengan mengisi dunia yang jahat dengan rahmat sakramental. Dengan kata lain, Gereja menyucikan dunia, jika orang Kristen menghadapi tantangan hidup perorangan

¹ Eddy Kristianto, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria* (Yogyakarta: Lamalera, 2008), hlm.vi

dan melibatkan diri pada pergulatan sosial-politis dalam kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan.²

Hal keterlibatan atau aksi sosial-politis Gereja ini, oleh Gereja Katolik, secara tegas telah dirumuskan antara lain berupa sejumlah Ajaran Sosial Gereja atau berupa pernyataan resmi para pemimpin Gereja (Uskup). Gereja perlu membuka jendela melihat dunia modern dengan segala ke luarbiasaanya dan segala problematikanya. Dalam *Sollicitudo Rei Socialis* Gereja Katolik mengklaim hak untuk angkat bicara dan ikut bicara dalam masalah sosial – ekonomi, dan untuk mengajak dan mendesak-desak hati nurani manusia. Demi keprihatinan sosial ini Gereja mendesak agar masalah sosial dan ekonomi dilihat dan diterima sebagai tantangan terhadap tanggung jawab manusia. Kewajiban sosial adalah kewajiban moral. Karena itu Gereja mengingatkan para anggota Gereja agar tidak menarik diri dari tanggung jawab sosial itu.³

Gereja pun ikut bicara dalam masalah sosial dan ekonomi sebagai masalah etik. Sebab masalah-masalah ekonomi tidak mengikuti semacam hukum alam yang mesti diindahkan, melainkan termasuk tanggung jawab manusia atas kelangsungan hidup manusia secara manusiawi, jika menemukan tujuannya yang terakhir dan transenden. Maka dalam arti yang khas, Gereja pun bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan sosial; dan kini Gereja terlibat pada masalah

²*Ibid.*, hlm.vii

³Paus Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis, Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 Dari Rerum Novarum Sampai Centesimus Annus*, dalam R. Hardawiryana (Penerj.), (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999). Art.12. selanjutnya akan disingkat *SRS* diikuti nomor artikelnya.

perkembangan manusia dan keterlibatan pada masalah perkembangan dalam rangka tugas pastoral Gereja.⁴

Dengan keterlibatan atau aksi ini, Gereja ingin menunjukkan pengabdianya kepada rencana ilahi yang ingin mengarahkan segala sesuatu pada kepenuhan yang hidup dalam Kristus (bdk. Kol.1:9) dan yang dikaruniakan kepada tubuh-Nya. Selain itu, Gereja hendak melaksanakan panggilannya yang pokok, yaitu untuk menjadi Sakramen atau tanda serta sarana untuk bersatu secara mendalam dengan Allah dan untuk kesatuan seluruh Umat Allah. Tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan sosial dan tidak ada pewartaan iman tanpa perjuangan untuk keadilan.⁵

Keberadaan Gereja sebagai satu persekutuan umat beriman didasarkan pada Misteri Allah Trinitas. Allah Trinitas, sebagaimana pernah diungkapkan teolog Leonardo Boff, adalah Allah persekutuan, *perikhoresis*.⁶ Dinamika persekutuan Trinitas ini adalah cinta. Allah tidak berbuat lain kecuali mencintai. Cinta *perikoresis* ini tidak hanya menyata di antara ketiga pribadi (Trinitas imanen), tetapi juga menyata kepada dunia (Trinitas ekonomis).⁷ Oleh karena cinta kepada dunia Allah mengutus Putra dan Roh Kudus kepada manusia agar manusia yang tercerai berai oleh dosa, hidup dalam persekutuan cinta. Demi persekutuan cinta ini, Gereja dipanggil selain untuk menghidupi persekutuan,

⁴Eddy Kristiyanto, *Op.Cit.*, hlm.vii

⁵*Ibid.*, hlm. viii

⁶*Ibid.*, hlm. v

⁷*Ibid.*

menjadi sarana atau sakramen keselamatan di tengah dunia, juga senantiasa berjuang menghantar semua orang kepada persekutuan dengan Allah.

Tindakan persekutuan semua orang ke dalam persekutuan cinta dengan Allah ini mengandaikan juga pada Gereja ada keterlibatan, keberpihakan. Seperti Allah yang mengutus Putra-Nya ke tengah dunia untuk mengemban misi penyelamatan, demikian juga Gereja dipanggil untuk masuk ke dalam dunia, terlibat dengan aneka persoalan hidup manusia. Setiap orang dibaptis, yang diikat dengan Kristus yang berinkarnasi dipanggil untuk masuk ke dalam dunia dan mengemban misi penyelamatan dalam cara hidup tertentu.⁸

Bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat diktakan bahwa iman sebenarnya jauh melampaui urusan pribadi; iman juga berhubungan dengan komunitas manusia, dengan komunitas beriman, karena iman merupakan sikap batin, tetapi sikap batin itu harus diungkapkan dalam bentuk yang lahiriah karena iman adalah iman seorang manusia, makhluk yang bukan rohani belaka melainkan rohani jasmani.⁹

Iman yang merupakan urusan pribadi dengan Tuhan juga memiliki suatu tendensi untuk memisahkan iman dari hidup harian. Iman hanya dilihat sebagai urusan pribadi dengan Tuhan. Relasi antara saya dengan Tuhan dalam hal iman adalah pertama dan utama. Dengan demikian kehidupan kaum beriman terasing

⁸*Ibid.*, hlm. vii

⁹Dr. Nico Syukur Diester, OFM, *Teologi Sistematis 2*, (Yogyakarta : Kanisius, 2004), hlm. 277

dari pola sosialitas, dari masyarakat. Iman semata-mata urusan dalam Gereja atau dalam tempat ibadat dan tidak berpengaruh bagi kehidupan harian.

Dalam konteks memberikan sumbangan pemikiran bagi kehidupan yang lebih baik, pada pertengahan abad ke-20 disebarluaskan istilah Teologi Politik. Istilah ini merupakan salah satu ciptaan teolog Katolik Roma dan Protestan untuk mengatasi krisis kebudayaan dengan dasar-dasar kekristenan dalam terang peristiwa abad ke-20.¹⁰ Teologi Politik dapat didefinisikan, baik sebagai teologi atau pemahaman teologis tentang pemikiran dan praktek politik, maupun sebagai sikap dan aksi politik Gereja yang visinya untuk perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Teologi Politik menjadi salah satu titik yang memberikan penyadaran kepada Gereja mengenai pentingnya aksi akan dasar iman yang tegak berdiri. Masyarakat diyakini sebagai medium hakiki bagi penemuan kebenaran teologis dan bagi pewartaan Kristen pada umumnya. Teologi Politik mengklaim menjadi unsur dasariah dalam keseluruhan struktur pemikiran teologis kritis, terdorong oleh suatu paham baru tentang relasi antara teori dan praktik, seturut mana semua teologi harus menjadi praktis dari dirinya sendiri. Jadi, Teologi Politik berorientasi pada aksi.¹¹

Teologi Politik tidak lagi menyibukan diri dengan sistem-sistem yang mencari pengertian dan kebenaran teologis. *Locus Theologicus* bagi teologi politik

¹⁰Eddy Kristiyanto, *Op.Cit.*, hlm.33

¹¹ *Ibid.*, hlm.35

bukanlah sistem tetapi sejarah khususnya sejarah mereka yang menderita. Teologi Politik memang tetap terjun dalam persoalan klasik Teologi Fundamental yakni masalah *Theodizee*, tetapi masalah *Theodizee* ini ditangani Teologi Politik bukan dalam konteks metafisik melainkan dalam konteks politis. Secara khusus Teologi politik memperhatikan nasib mereka yang menderita, mereka yang kalah dan mereka yang menjadi kurban sejarah.¹²

Seorang teolog yang dianggap memperbarui makna Teologi Politik adalah Johann Baptist Metz. Ia memperkenalkan gagasan Teologi Politik sebagai teologi yang transformatif. Apa yang ingin ditransformasikan di sini adalah kecenderungan manusia modern yang individualis sehingga memprivatisasi iman dan menjadikan iman tak lagi relevan dengan situasi sosial yang ada.¹³ Term privatisasi dalam hal ini menjadi konsentrasi yang ingin ia lawan. Apa yang ingin dilawan oleh Teologi Politik adalah kecenderungan privatisasi yang mengakibatkan tersebarinya sikap acuh tak acuh terhadap sesama manusia dan alam di sekitarnya. Sikap acuh tak acuh ini menjadi penghambat utama terwujudnya komunitas yang dituju dalam post-modernitas. Sebuah komunitas yang guyub tidak mungkin terjadi apabila anggotanya saling acuh tak acuh satu sama lain. Kenyataan privatisasi semacam itu direfleksikan oleh Johann Baptist Metz dalam konteks masyarakat modern Eropa.¹⁴

¹²G. P. Sindhunata, SJ., dalam Budi Susanto, SJ (Editor), *Teologi dan Praksis Komunitas Post Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 199-200

¹³Yohanes Antononius Lelaona, SVD., *Berteologi Di Tengah Pergulatan Hidup*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2014), hlm.30

¹⁴*Ibid.*, hlm.31

Realitas masyarakat dan masalah penderitaan dan ketidakadilan yang melanda manusia mendorong Johann Baptist Metz melahirkan hasil karyanya ini. Melalui Teologi Politiknya Johann Baptist mendorong Gereja dan umat Kristen agar berani menanggapi dan membantu menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah dunia. Teologi Politik Johann Baptist Metz memfokuskan diri pada manusia sebagai subyek utama, dan kebajikan solidaritas sebagai undangan kepada orang-orang Kristen agar mewujudkan imannya melalui tindakan dan perbuatan nyata di dalam kehidupan sosial.

Dengan Teologi Politik ini ia mendorong orang Kristen agar berani menanggapi berbagai masalah yang melanda masyarakat dunia saat ini sehingga membawa suatu transformasi bagi kehidupan seluruh umat manusia. Relevansi Teologi Politik ini adalah sebuah kritik bagi teologi terutama teologi transendental dan teologi yang bersifat ideologis, dan juga kritik kepada Gereja dan teolog agar menyadari misinya dan mengembangkan teologi yang tidak hanya mengarah kepada aspek eskatologis semata, dan juga tidak hanya melahirkan teologi yang lebih bersifat mempertahankan iman dalam arti sempit, tetapi juga teologi yang mampu menanggapi masalah manusia dalam kehidupannya yang nyata, bukan ideologi atau spiritualitas abstrak.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis ingin mendalami tema Teologi Politik dengan judul: **TEOLOGI POLITIK SEBAGAI TEOLOGI SOLIDARITAS PERSPEKTIF JOHANN BAPTIST METZ DAN RELEVANSINYA BAGI PENGHYATAN IMAN GEREJA ZAMAN INI.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemahaman pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksudkan dengan Teologi Politik?
2. Apa makna Teologi Politik menurut Johann Baptist Metz?
3. Apa maksud Teologi Politik Sebagai Teologi Solidaritas?
4. Apa relevansi Teologi Politik sebagai teologi solidaritas Johann Baptist Metz bagi iman Gereja zaman ini?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan makna Teologi Politik
2. Menjelaskan makna Teologi politik Johann Baptist Metz.
3. Menjelaskan makna Teologi Politik sebagai Teologi Solidaritas perspektif Johann Baptist Metz
4. Menjelaskan makna Teologi Politik sebagai Teologi Solidaritas perspektif Johann Baptist Metz dan relevansinya bagi penghayatan iman Gereja zaman ini.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Gereja

Gereja merupakan umat Allah yang beriman kepada Kristus dan sedang berziarah menuju Allah. Semoga melalui tulisan ini membantu segenap anggota

Gereja untuk dapat mengaktualisasikan imannya di masyarakat dengan membantu sesama yang menderita atau membutuhkan.

1.4.2 Bagi Sivitas Akademika Fakultas Filsafat

Karya tulis ini diharapkan agar dapat membantu segenap Sivitas Akademika Fakultas Filsafat untuk memahami Teologi Politik sebagai Teologi Solidaritas perspektif Johann Baptist Metz.

1.4.3 Bagi Penulis Sendiri

Karya ini merupakan suatu langkah awal bagi penulis untuk menelisik dan mempelajari lebih mendalam tentang Teologi Politik sebagai Teologi Solidaritas perspektif Johann Baptist Metz.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Sumber utama yang digunakan oleh penulis adalah hasil karya dari Johann Baptist Metz dan buku-buku yang berkaitan dengan Teologi Politik Johann Baptist Metz.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membuat kajian atas tema ini yang meliputi lima pokok bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berbicara seputar latar belakang permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II: Biografi dan Latar Belakang Pemikiran. Dalam bagian ini penulis membahas tentang biografi Johann Baptist Metz, karya-karya dan latar belakang pemikiran Teologi Politik.

Bab III: Teologi Politik Sebagai Teologi Solidaritas. Dalam bab ini penulis menampilkan landasan teoritis Teologi Politik Johann Baptist Metz.

Bab IV: Teologi Politik Sebagai Teologi Solidaritas Perspektif Johann Baptist Metz Dan Relevansi Bagi Iman Gereja Zaman Ini. Bab ini berbicara mengenai relevansi iman Teologi Politik sebagai teologi solidaritas dalam Gereja zaman ini.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian tulisan ini yang terdiri dari kesimpulan, catatan Kritis dan usul saran.